

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sanksi hukum disiplin militer oleh Denpom IV/2 Yogyakarta berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip keadilan dan pembinaan. Penanganan kasus pelanggaran khususnya THTI, dilakukan secara sistematis melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan, hingga sidang disiplin oleh Ankum. Selain bertindak sebagai penegak hukum, Denpom juga menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada satuan di wilayah yurisdiksinya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin militer tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif.

Peran Ankum dalam struktur militer tidak hanya sebagai penegak sanksi, tetapi juga sebagai pembina disiplin yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Melalui kewenangannya, Ankum menilai pelanggaran secara objektif, menjatuhkan sanksi yang proporsional, dan mendorong perubahan perilaku prajurit. Di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta, tugas ini dijalankan secara sistematis melalui koordinasi lintas bagian dan pendekatan edukatif. Dengan demikian, Ankum menjadi figur sentral dalam menjaga integritas, moral, dan ketertiban di lingkungan TNI-AD.

B. Saran

1. Sosialisasi hukum disiplin militer perlu ditingkatkan secara rutin dan menyeluruh ke seluruh satuan di bawah Denpom IV/2 Yogyakarta.
2. Pendekatan humanis dan komunikatif harus terus dikembangkan dalam penanganan pelanggaran yang dilatarbelakangi masalah pribadi atau psikologis.
3. Setiap Ankom hendaknya menjalankan peran sebagai teladan moral dan disiplin, karena konsistensi dan integritas mereka memengaruhi perilaku prajurit.
4. Ankom perlu melakukan evaluasi pasca-sanksi untuk menilai apakah bentuk hukuman yang dijatuhkan benar-benar efektif dalam membina dan mengubah perilaku pelanggar.
5. Komunikasi antara satuan dan Denpom harus ditingkatkan agar proses pelaporan dan pemeriksaan pelanggaran berjalan lebih efisien dan transparan.